

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

FORMAT BERITA ACARA REVIU

BERITA ACARA
HASIL REVIEW SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
(Nama Dokumen) Tahun

(Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN KAPUAS

Pada hari ini ..., Tanggal ... Bulan ... Tahun ..., kami Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Kapuas, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan ... Nomor :... Tanggal ..., telah melaksanakan Review Sasaran, Program dan Kegiatan (Nama Dokumen) Organisasi Perangkat Daerah, dengan rincian hasil 5 sebagai berikut:

I. SASARAN

a. Uraian Sasaran Sebelum Review

SASARAN
1.
2.
3. Dst

b. Rekomendasi Tim Review tentang Sasaran

SASARAN
1.
2.
3. Dst

II. INDIKATOR SASARAN

a. Uraian Indikator Sasaran Sebelum Review

SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1.	
2.	
3. Dst	

b. Rekomendasi Tim Review tentang Indikator Sasaran

1.	
2.	
3. Dst	

III. PROGRAM

a. Uraian Program Sebelum Review

SASARAN	PROGRAM
1.	
2.	
3. Dst	

b. Rekomendasi Tim Review tentang Program

1.	
2.	
3. Dst	

IV. INDIKATOR PROGRAM

a. Uraian Indikator Program Sebelum Review

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1.	
2.	
3. Dst	

b. Rekomendasi Tim Review tentang Indikator Program

1.	
2.	
3. Dst	

V. KEGIATAN

a. Uraian Kegiatan Sebelum Review

PROGRAM	KEGIATAN
1.	
2.	
3. Dst	

b. Rekomendasi Tim Review tentang Kegiatan

1.	
2.	
3. Dst	

VI. INDIKATOR KEGIATAN

a. Uraian Indikator Kegiatan Sebelum Review

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
1.	
2.	
3. Dst	

b. Rekomendasi Tim Review tentang Indikator Kegiatan

1.	
2.	
3. Dst	

Demikian Hasil Review Sasaran, Program dan Kegiatan (*Nama Dokumen*) oleh Tim Penerapan SAKIP Kabupaten Kapuas, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan selanjutnya.

Komentar Pejabat:

Tanggal:

Kepala:

TIM PENERAPAN SAKIP KABUPATEN KAPUAS		
NO	Nama	Tanda Tangan
1		
2		
Dst.		

BUPATI KAPUAS,
ttd
BEN BRAHIM S. BAHAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KRISTOP, SH.,MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19620315 199103 1 010



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

FORMAT RENCANA KINERJA TAHUNAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN
(Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN KAPUAS
TAHUN

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

(Kepala Perangkat Daerah)
Kabupaten Kapuas,

(Nama)
(Pangkat)
(NIP)

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Pada kolom (1) diisi no urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis perangkat daerah sesuai dokumen Renstra perangkat daerah atau dokumen Indikator Kinerja Utama perangkat daerah;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari perangkat daerah yang relevan dengan sasaran sesuai dengan dokumen Renstra perangkat daerah dan dokumen Indikator Kinerja Utama perangkat daerah;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh perangkat daerah pada tahun tersebut;
- 5) Pada kolom (5) diisi dengan nama program dan nama kegaitan perangkat daerah yang terkait dengan sasaran strategis;
- 6) Pada kolom (6) diisi dengan indikator program dan indikator kegiatan sesuai dengan dokumen Renstra perangkat daerah;
- 7) Pada kolom (7) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai;
- 8) Pada kolom (8) diisi dengan besaran anggaran program dan kegaitan yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan.

BUPATI KAPUAS,
ttd
BEN BRAHIM S. BAHAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KRISTOP, SH.,MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19620315 199103 1 010

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

FORMAT RENCANA AKSI

RENCANA AKSI
(Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN KAPUAS
TAHUN

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Program/ Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Pekerjaan	Jadwal Bulan ke-		
									1	2	dst
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			(10)

(Kepala Perangkat Daerah)
Kabupaten Kapuas,

(Nama)
(Pangkat)
(NIP)

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Pada kolom (1) diisi no urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis perangkat daerah sesuai dokumen Renstra perangkat daerah atau dokumen Indikator Kinerja Utama perangkat daerah;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari perangkat daerah yang relevan dengan sasaran sesuai dengan dokumen Renstra perangkat daerah dan dokumen Indikator Kinerja Utama perangkat daerah;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh perangkat daerah pada tahun tersebut;
- 5) Pada kolom (5) diisi dengan nama program perangkat daerah yang terkait dengan sasaran strategis;
- 6) Pada kolom (6) diisi dengan indikator program atau indikator kegiatan sesuai dengan dokumen Renstra perangkat daerah;
- 7) Pada kolom (7) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai;
- 8) Pada kolom (8) diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran, program dan kegiatan yang diperjanjikan;
- 9) Pada kolom (9) diisi dengan pekerjaan atau aktivitas yang dilaksanakan dalam suatu kegiatan;
- 10) Pada kolom (10) diisi dengan kapan waktu pekerjaan atau aktivitas dilaksanakan dalam kurun waktu 12 bulan.

BUPATI KAPUAS,

ttd
BEN BRAHIM S. BAHAT



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KRISTOP, SH.,MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19620315 199103 1 010

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KAPUAS

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH



KOP PERANGKAT DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA (*Nama Perangkat Daerah*)

NOMOR :

T E N T A N G

INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA (*Nama Perangkat Daerah*) TAHUN

KEPALA (*Nama Perangkat Daerah*),

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja (*Nama Perangkat Daerah*) Kabupaten Kapuas adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis organisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala (*Nama Perangkat Daerah*) Kabupaten Kapuas Tahun
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 35 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas;
8. Peraturan Bupati Kapuas Nomor Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja (*Nama Perangkat Daerah*);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama *(Nama Perangkat Daerah)* Tahun ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) *(Nama Perangkat Daerah)*;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggalbulantahun

(Kepala Perangkat Daerah)
Kabupaten Kapuas,

(Nama)
(Pangkat)
(NIP)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas
Up. Kepala Bagian Organisasi
di Kuala Kapuas
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten
Kapuas di Kuala Kapuas
3. Inspektur Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas

**FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH**

INDIKATOR KINERJA UTAMA
(Nama Perangkat Daerah)
TAHUN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formulasi Perhitungan	Penanggung jawab	Sumber data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(Kepala Perangkat Daerah)
Kabupaten Kapuas,

(Nama)
(Pangkat)
(NIP)

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi no urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran Program Perangkat Daerah sesuai dokumen Renstra Perangkat Daerah;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator program yang relevan dengan sasaran strategis Perangkat Daerah dan sesuai dengan dokumen Renstra Perangkat Daerah;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan definisi operasional atau petunjuk yang jelas bagaimana cara mengukur suatu indikator;
- 5) Pada kolom (5) diisi dengan unit kerja yang memiliki kewenangan atau memiliki tugas untuk menyajikan data sasaran strategis;
- 6) Pada kolom (6) diisi dengan rujukan utama dalam memperoleh data sebagai bahan dalam pengukuran suatu indikator.

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KRISTOP, SH.,MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19620315 199103 1 010

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

FORMAT CASCADING KINERJA

CASCADING KINERJA
(Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN KAPUAS
TAHUN ...

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

(Kepala Perangkat Daerah)
Kabupaten Kapuas,

(Nama)
(Pangkat)
(NIP)

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi no urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan tujuan perangkat daerah sesuai dengan Renstra perangkat daerah atau dokumen Indikator Kinerja Utama perangkat daerah;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator tujuan dan indikator lain dari perangkat daerah yang relevan dengan tujuan sesuai dengan dokumen Renstra perangkat daerah dan dokumen Indikator Kinerja Utama perangkat daerah;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan sasaran strategis perangkat daerah sesuai dokumen Renstra perangkat daerah atau dokumen Indikator Kinerja Utama perangkat daerah;
- 5) Pada kolom (5) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari perangkat daerah yang relevan dengan sasaran sesuai dengan dokumen Renstra perangkat daerah dan dokumen Indikator Kinerja Utama perangkat daerah;
- 6) Pada kolom (6) diisi dengan nama program perangkat daerah terkait dengan pencapaian sasaran strategis;
- 7) Pada kolom (7) diisi dengan sasaran program atau kondisi/hasil yang akan dicapai/diwujudkan dari pelaksanaan program;
- 8) Pada kolom (8) diisi dengan indikator program sesuai dengan dokumen Renstra perangkat daerah atau indikator yang relevan dengan sasaran program yang ingin diwujudkan;
- 9) Pada kolom (9) diisi dengan nama kegiatan perangkat daerah terkait dengan pencapaian program;
- 10) Pada kolom (10) diisi dengan sasaran kegiatan atau kondisi/hasil yang akan dicapai/diwujudkan dari pelaksanaan kegiatan;

11) Pada kolom (11) diisi dengan indikator kegiatan sesuai dengan dokumen Renstra perangkat daerah atau indikator yang relevan dengan sasaran kegiatan yang ingin diwujudkan.

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KRISTOP, SH.,MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19620315 199103 1 010



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

FORMAT PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Bupati Kapuas

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kuala Kapuas,

BUPATI KAPUAS,

.....

2. Lampiran Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

Program

Anggaran

1. Rp.

2. Rp.

Kuala Kapuas,
Bupati Kapuas,
.....

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Pada kolom (1) diisi no urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Pemerintah Daerah atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari Pemerintah Daerah yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Pemerintah Daerah;
- 5) Pada kolom Program diisi dengan nama program Pemerintah Daerah yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai;
- 6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan.

FORMAT PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA
 (Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN KAPUAS
 TAHUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Jabatan : KEPALA (Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN KAPUAS

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :
 Jabatan : BUPATI KAPUAS

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Kapuas, Januari

Pihak Kedua,
 BUPATI KAPUAS,

Pihak Pertama,
 KEPALA (Nama Perangkat Daerah)
 KABUPATEN KAPUAS,

.....

(NAMA)
 (Pangkat)
 (NIP)

2. Lampiran Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA
(Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN KAPUAS
TAHUN

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
4			

Program

Anggaran

1.

2.

3.

Kuala Kapuas,

BUPATI KAPUAS,

.....

KEPALA (Nama Perangkat Daerah)
KABUPATEN KAPUAS,

(NAMA)
(Pangkat)
(NIP)

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi no urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis perangkat daerah sesuai dokumen Renstra perangkat daerah atau dokumen Indikator Kinerja Utama perangkat daerah;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari perangkat daerah yang relevan dengan sasaran sesuai dengan dokumen Renstra perangkat daerah dan dokumen Indikator Kinerja Utama perangkat daerah;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh perangkat daerah pada tahun tersebut;
- 5) Pada kolom Program diisi dengan nama program yang terkait dengan sasaran strategis;
- 6) Pada kolom Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang dialokasikan pada program tersebut.
- 7) Pada kolom Keterangan diisi dengan keterangan tambahan yang penting, misalnya proporsi sumber dana (APBD, APBN Dekonsentrasi atau tugas pembantuan) dan hal penting lainnya.

FORMAT PERJANJIAN KINERJA JABATAN ADMINISTRASI (ADMINISTRATOR)

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA
 BAGIAN / BIDANG
 (Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN KAPUAS
 TAHUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Jabatan : (Jabatan Administrator) PADA (Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN KAPUAS

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :
 Jabatan : KEPALA (Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN KAPUAS

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Kapuas,

Pihak Kedua,
 KEPALA (Nama Perangkat Daerah)
 KABUPATEN KAPUAS

(NAMA)
 (Pangkat)
 (NIP)

Pihak Pertama,
 (Jabatan Administrator),

(NAMA)
 (Pangkat)
 (NIP)

2. Lampiran Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA
BAGIAN/BIDANG
(Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN KAPUAS
TAHUN

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
4			

Program

Anggaran

1.

2.

3.

Pihak Kedua,
KEPALA (Nama Perangkat Daerah)
KABUPATEN KAPUAS,

(NAMA)
(Pangkat)
(NIP)

Pihak Pertama,

(Jabatan Administrator),

(NAMA)
(Pangkat)
(NIP)

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi no urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran Program Perangkat Daerah sesuai dokumen Renstra Perangkat Daerah;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator program yang relevan dengan sasaran strategis Perangkat Daerah dan sesuai dengan dokumen Renstra Perangkat Daerah;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Bagian/Bidang pada tahun tersebut;
- 5) Pada kolom Program diisi dengan nama program yang terkait dengan sasaran program;
- 6) Pada kolom Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang dialokasikan pada program tersebut.
- 7) Pada kolom Keterangan diisi dengan keterangan tambahan yang penting, misalnya proporsi sumber dana (APBD, APBN Dekonsentrasi atau tugas pembantuan) dan hal penting lainnya.

FORMAT PERJANJIAN KINERJA JABATAN ADMINISTRASI (PENGAWAS)

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BAGIAN/ KEPALA SEKSI
BAGIAN / BIDANG
(Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN KAPUAS
TAHUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : (Jabatan Pengawas) PADA (Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN KAPUAS

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :
Jabatan : (Atasan Langsung) PADA (Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN KAPUAS

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Kapuas,

Pihak Kedua,
(Atasan Langsung),

Pihak Pertama,
(Jabatan Pengawas),

(NAMA)
(Pangkat)
(NIP)

(NAMA)
(Pangkat)
(NIP)

Mengetahui,
KEPALA (Nama Perangkat Daerah)
KABUPATEN KAPUAS,

(NAMA)
(Pangkat)
(NIP)

2. Lampiran Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BAGIAN / KEPALA SEKSI
(Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN KAPUAS
TAHUN

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
4			

KEGIATAN

ANGGARAN

1.

2.

3.

Pihak Kedua,
Atasan Langsung,

(NAMA)
(Pangkat)
(NIP)

Pihak Pertama,
(Jabatan Pengawas),

(NAMA)
(Pangkat)
(NIP)

Mengetahui,
KEPALA (Nama Perangkat Daerah)
KABUPATEN KAPUAS,

(NAMA)
(Pangkat)
(NIP)

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi no urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dokumen Renstra Perangkat Daerah;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator program yang relevan dengan sasaran strategis Perangkat Daerah dan sesuai dengan dokumen Renstra Perangkat Daerah;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Bagian/Bidang pada tahun tersebut;
- 5) Pada kolom Kegiatan diisi dengan nama kegiatan yang terkait dengan pencapaian sasaran program;
- 6) Pada kolom Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang dialokasikan pada program tersebut.
- 7) Pada kolom Keterangan diisi dengan keterangan tambahan yang penting, misalnya proporsi sumber dana (APBD, APBN Dekonsentrasi atau tugas pembantuan) dan hal penting lainnya.

FORMAT PERJANJIAN KINERJA JABATAN ADMINISTRASI (PELAKSANA)

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA
(Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN KAPUAS
TAHUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : (Jabatan Pelaksana) PADA (Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN KAPUAS

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :
Jabatan : (Atasan Langsung) PADA (Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN KAPUAS

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Kapuas,

Pihak Kedua,
(Atasan Langsung),

Pihak Pertama,
(Jabatan Pelaksana),

(NAMA)
(Pangkat)
(NIP)

(NAMA)
(Pangkat)
(NIP)

Mengetahui,
KEPALA DINAS/BADAN/SEKRETARIAT

(NAMA)
(Pangkat/Golongan)
(NIP)

2. Lampiran Perjanjian Kinerja Pelaksana

PERJANJIAN KINERJA
(Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN KAPUAS
TAHUN

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
4			

Pihak Kedua,
(Atasan Langsung),

(NAMA)
(Pangkat)
(NIP)

Pihak Pertama,
(Jabatan Pelaksana),

(NAMA)
(Pangkat)
(NIP)

Mengetahui,
KEPALA (Nama Perangkat Daerah)
KABUPATEN KAPUAS,

(NAMA)
(Pangkat)
(NIP)

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- 1)

Pada kolom (1) diisi no urut;
- 2)

Pada kolom (2) diisi dengan sasaran kinerja sesuai dengan penjabaran sasaran kegiatan atasan langsung dan/atau memperhatikan uraian tugas pelaksana;
- 3)

Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran kinerja dan memenuhi kriteria indikator kinerja;
- 4)

Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai pada tahun tersebut.

FORMAT PERJANJIAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL

3. Pernyataan Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA
 (Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN KAPUAS
 TAHUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Jabatan : (Jabatan Fungsional) PADA (Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN KAPUAS

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :
 Jabatan : (Atasan Langsung) PADA (Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN KAPUAS

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Kapuas,

Pihak Kedua,
 (Atasan Langsung),

Pihak Pertama,
 (Jabatan Fungsional),

(NAMA)
 (Pangkat)
 (NIP)

(NAMA)
 (Pangkat)
 (NIP)

Mengetahui,
 KEPALA (Nama Perangkat Daerah)
 KABUPATEN KAPUAS,

(NAMA)
 (Pangkat)
 (NIP)

4. Lampiran Perjanjian Kinerja Pejabat Fungsional

PERJANJIAN KINERJA
(Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN KAPUAS
TAHUN

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
4			

Pihak Kedua,
(Atasan Langsung),

(NAMA)
(Pangkat)
(NIP)

Pihak Pertama,
(Jabatan Fungsional),

(NAMA)
(Pangkat)
(NIP)

Mengetahui
KEPALA (Nama Perangkat Daerah)
KABUPATEN KAPUAS,

(NAMA)
(Pangkat)
(NIP)

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi no urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran kinerja sesuai dengan memperhatikan sasaran kegiatan atasan langsung dan uraian butir kegiatan fungsional;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran kinerja dan memenuhi kriteria indikator kinerja;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai pada tahun tersebut.

FORMAT PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja Perubahan



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Bupati Kapuas

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kuala Kapuas,

BUPATI KAPUAS,

.....

2. Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

Program

Anggaran

3. Rp.

4. Rp.

Kuala Kapuas,

Bupati Kapuas,

.....

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Pada kolom (1) diisi no urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Pemerintah Daerah atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari Pemerintah Daerah yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Pemerintah Daerah;
- 5) Pada kolom Program diisi dengan nama program Pemerintah Daerah yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai;
- 6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan.

FORMAT PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja Perubahan



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
 (Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN KAPUAS
 TAHUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Jabatan : KEPALA (Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN KAPUAS

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :
 Jabatan : BUPATI KAPUAS

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Kapuas,

Pihak Kedua,
 BUPATI KAPUAS,

Pihak Pertama,
 KEPALA (Nama Perangkat Daerah)
 KABUPATEN KAPUAS,

.....

(NAMA)
 (Pangkat)
 (NIP)

2. Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
(Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN KAPUAS
TAHUN

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
4			

Program

Anggaran

1.

2.

3.

Kuala Kapuas,

BUPATI KAPUAS,

.....

KEPALA (Nama Perangkat Daerah)
KABUPATEN KAPUAS,

(NAMA)
(Pangkat)
(NIP)

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi no urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis perangkat daerah sesuai dokumen Renstra perangkat daerah atau dokumen Indikator Kinerja Utama perangkat daerah;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari perangkat daerah yang relevan dengan sasaran sesuai dengan dokumen Renstra perangkat daerah dan dokumen Indikator Kinerja Utama perangkat daerah;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh perangkat daerah pada tahun tersebut;
- 5) Pada kolom Program diisi dengan nama program yang terkait dengan sasaran strategis;
- 6) Pada kolom Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang dialokasikan pada program tersebut.
- 7) Pada kolom Keterangan diisi dengan keterangan tambahan yang penting, misalnya proporsi sumber dana (APBD, APBN Dekonsentrasi atau tugas pembantuan) dan hal penting lainnya.

FORMAT PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN JABATAN ADMINISTRASI (ADMINISTRATOR)

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja Perubahan



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
 BAGIAN / BIDANG
 (Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN KAPUAS
 TAHUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Jabatan : (Jabatan Administrator) PADA (Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN KAPUAS

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :
 Jabatan : KEPALA (Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN KAPUAS

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Kapuas,

Pihak Kedua,
 KEPALA (Nama Perangkat Daerah)
 KABUPATEN KAPUAS,

(NAMA)
 (Pangkat)
 (NIP)

Pihak Pertama,
 (Jabatan Administrator),

(NAMA)
 (Pangkat)
 (NIP)

2. Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BAGIAN/BIDANG
(Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN KAPUAS
TAHUN

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
4			

Program

1.

2.

3.

Anggaran

Pihak Kedua,

KEPALA (Nama Perangkat Daerah)

KABUPATEN KAPUAS,

(NAMA)

(Pangkat)

(NIP)

Pihak Pertama,

(Jabatan Administrator),

(NAMA)

(Pangkat)

(NIP)

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi no urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran Program Perangkat Daerah sesuai dokumen Renstra Perangkat Daerah;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator program yang relevan dengan sasaran strategis Perangkat Daerah dan sesuai dengan dokumen Renstra Perangkat Daerah;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Bagian/Bidang pada tahun tersebut;
- 5) Pada kolom Program diisi dengan nama program yang terkait dengan sasaran program;
- 6) Pada kolom Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang dialokasikan pada program tersebut.
- 7) Pada kolom Keterangan diisi dengan keterangan tambahan yang penting, misalnya proporsi sumber dana (APBD, APBN Dekonsentrasi atau tugas pembantuan) dan hal penting lainnya.

FORMAT PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN JABATAN ADMINISTRASI (PENGAWAS)

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja Perubahan



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
 KEPALA SUB BAGIAN/ KEPALA SEKSI
 BAGIAN / BIDANG
 (Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN KAPUAS
 TAHUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Jabatan : (Jabatan Pengawas) PADA (Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN KAPUAS

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :
 Jabatan : (Atasan Langsung) PADA (Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN KAPUAS

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Kapuas,

Pihak Kedua,
 (Atasan Langsung),

Pihak Pertama,
 (Pejabat Pengawas),

(NAMA)
 (Pangkat)
 (NIP)

(NAMA)
 (Pangkat)
 (NIP)

Mengetahui,
 KEPALA (Nama Perangkat Daerah)
 KABUPATEN KAPUAS,

(NAMA)
 (Pangkat)
 (NIP)

2. Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA SUB BAGIAN / KEPALA SEKSI
(Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN KAPUAS
TAHUN

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
4			

KEGIATAN

ANGGARAN

1.

2.

3.

Pihak Kedua,
(Atasan Langsung),

(NAMA)
(Pangkat)
(NIP)

Pihak Pertama,
(Jabatan Pengasas),

(NAMA)
(Pangkat)
(NIP)

Mengetahui,
KEPALA (Nama Perangkat Daerah)
KABUPATEN KAPUAS,

(NAMA)
(Pangkat)
(NIP)

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi no urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dokumen Renstra Perangkat Daerah;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator program yang relevan dengan sasaran strategis Perangkat Daerah dan sesuai dengan dokumen Renstra Perangkat Daerah;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Bagian/Bidang pada tahun tersebut;
- 5) Pada kolom Program diisi dengan nama program yang terkait dengan sasaran program;
- 6) Pada kolom Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang dialokasikan pada program tersebut.
- 7) Pada kolom Keterangan diisi dengan keterangan tambahan yang penting, misalnya proporsi sumber dana (APBD, APBN Dekonsentrasi atau tugas pembantuan) dan hal penting lainnya.

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja Perubahan



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
 (Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN KAPUAS
 TAHUN ...

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Jabatan : (Jabatan Pelaksana) PADA (Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN KAPUAS

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :
 Jabatan : (Atasan Langsung) PADA (Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN KAPUAS

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Kapuas,

Pihak Kedua,
 (Atasan Langsung),

Pihak Pertama,
 (Jabatan Pelaksana),

(NAMA)
 (Pangkat)
 (NIP)

(NAMA)
 (Pangkat)
 (NIP)

Mengetahui,
 KEPALA (Nama Perangkat Daerah)
 KABUPATEN KAPUAS,

(NAMA)
 (Pangkat)
 (NIP)

2. Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan Pelaksana

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
(Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN KAPUAS
TAHUN

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
4			

Pihak Kedua,
(Atasan Langsung),

(NAMA)
(Pangkat)
(NIP)

Pihak Pertama,
(Jabatan Pelaksana),

(NAMA)
(Pangkat)
(NIP)

Mengetahui,
KEPALA (Nama Perangkat Daerah)
KABUPATEN KAPUAS,

(NAMA)
(Pangkat)
(NIP)

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi no urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran kinerja sesuai dengan penjabaran sasaran kegiatan atasan langsung dan/atau memperhatikan uraian tugas pelaksana;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran kinerja dan memenuhi kriteria indikator kinerja;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai pada tahun tersebut.

FORMAT PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN JABATAN FUNGSIONAL

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja Perubahan



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
 (Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN KAPUAS
 TAHUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Jabatan : (Pejabat Fungsional) PADA (Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN KAPUAS

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :
 Jabatan : (Atasan Langsung) PADA (Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN KAPUAS

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Kapuas,

Pihak Kedua,
 (Atasan Langsung),

Pihak Pertama,
 (Jabatan Fungsional),

(NAMA)
 (Pangkat)
 (NIP)

(NAMA)
 (Pangkat)
 (NIP)

Mengetahui,
 KEPALA (Nama Perangkat Daerah)
 KABUPATEN KAPUAS,

(NAMA)
 (Pangkat)
 (NIP)

2. Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
(Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN KAPUAS
TAHUN

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
4			

Pihak Kedua,
(Atasan Langsung),

(NAMA)
(Pangkat)
(NIP)

Pihak Pertama,
(Jabatan Fungsional),

(NAMA)
(Pangkat)
(NIP)

Mengetahui,
KEPALA (Nama Perangkat Daerah)
KABUPATEN KAPUAS,

(NAMA)
(Pangkat)
(NIP)

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi no urut;

2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran kinerja sesuai dengan memperhatikan sasaran kegiatan atasan langsung dan uraian butir kegiatan fungsional;

3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran kinerja dan memenuhi kriteria indikator kinerja;

4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai pada tahun tersebut.

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KRISTOP, SH.,MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19620315 199103 1 010



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

FORMAT DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA
Nama Perangkat Daerah KABUPATEN KAPUAS
TAHUN ...

No.	Sasaran / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Triwulan I/II/III/IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(Kepala Perangkat Daerah)
KABUPATEN KAPUAS,

(NAMA)
(Pangkat)
(NIP)

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi no urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan :
 - Sasaran strategis perangkat daerah sesuai dokumen Renstra perangkat daerah atau dokumen Indikator Kinerja Utama perangkat daerah;
 - Nama program yang terkait dengan pencapaian sasaran strategis;
 - Nama kegiatan yang terkait dengan pencapaian program;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran strategis, program dan kegiatan pada perangkat daerah dan sesuai dengan dokumen Renstra Perangkat Daerah;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai yang termuat dalam dokumen perjanjian kinerja;
- 5) Pada kolom (5) diisi dengan nilai realisasi atas target berdasarkan kemajuan pencapaian sasaran strategis, program dan kegiatan.

BUPATI KAPUAS,

ttd
BEN BRAHIM S. BAHAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KRISTOP, SH.,MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19620315 199103 1 010

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II

Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini,

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir,

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
				Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi,

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD /RENSTRA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Nasional	Keterangan

5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Tabel 3.6
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran

Tabel 3.7
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Anggaran	Alokasi	Realisasi	Capaian

Tabel 3.8
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program

No.	Nama Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Anggaran	Alokasi	Realisasi	Capaian

BABIV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Rencana Aksi
- 3) Pengukuran Kinerja

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KRISTOP, S.H.,MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19620315 199103 1 010

